

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) pada Dinas Pariwisata Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pengajuan SPP-GU pada Dinas Pariwisata Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Proses pengajuan dilakukan secara berjenjang mulai dari pengumpulan bukti transaksi, penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), penyusunan dokumen SPP-GU, verifikasi oleh PPK-SKPD, persetujuan oleh PA/KPA, hingga pencairan dana oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
2. Tahapan dan dokumen dalam pengajuan SPP-GU memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran proses pencairan dana. Dokumen yang harus dipenuhi antara lain SPP-GU, SPJ, kuitansi atau bukti pembayaran, nota atau faktur pembelian, daftar rincian pengeluaran, surat pernyataan tanggung jawab, serta dokumen pendukung lainnya. Kelengkapan dan ketepatan dokumen menjadi faktor utama dalam mempercepat proses verifikasi dan pencairan dana.
3. Dalam pelaksanaan prosedur pengajuan SPP-GU masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen, kesalahan pengisian administrasi, keterlambatan verifikasi, kurangnya koordinasi antarunit kerja, keterbatasan

kompetensi sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem digital. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, memperkuat koordinasi antarbagian, meningkatkan pengawasan internal, menerapkan SOP yang lebih jelas, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi keuangan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pariwisata Kota Padang

- **Terkait Prosedur Pengajuan SPP-GU**

Dinas Pariwisata Kota Padang diharapkan dapat mempertahankan pelaksanaan prosedur pengajuan SPP-GU yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terus melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan prosedur agar proses pengajuan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

- **Terkait Tahapan Administrasi dan Kelengkapan Dokumen**

Diperlukan peningkatan ketelitian dalam penyusunan dan pemeriksaan dokumen pendukung SPP-GU, seperti SPJ, kuitansi, nota, dan dokumen administrasi lainnya. Selain itu, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dapat membantu meminimalkan kesalahan administrasi dan mempercepat proses verifikasi.

- **Terkait Kendala dalam Pengajuan SPP-GU**

Untuk mengatasi berbagai kendala yang masih ditemukan dalam proses pengajuan SPP-GU, seperti ketidaklengkapan dokumen, kesalahan pengisian formulir, keterlambatan verifikasi, dan kurangnya koordinasi antarunit, perlu dilakukan pelatihan secara berkala kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan serta peningkatan koordinasi dan komunikasi antarbagian.

- **Terkait Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Dinas Pariwisata Kota Padang diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi berbasis digital dalam proses pengajuan, verifikasi, dan pencairan dana SPP-GU sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan SPP-GU dengan menggunakan metode yang lebih mendalam atau melakukan perbandingan dengan instansi pemerintah lainnya sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas prosedur pengajuan SPP-GU. Dinas Pariwisata Kota Padang diharapkan dapat mempertahankan pelaksanaan prosedur pengajuan SPP-GU yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terus melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan prosedur agar proses pengajuan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.